

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan jaringan informasi berbasis teknologi internet di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah. Jaringan informasi berbasis teknologi internet yang digunakan pemerintah tersebut dikenal dengan nama *Electronic Government*.

Menurut Clay G. Wescott Pejabat Senior *Asian Development Bank* ketika mempelajari penerapan *e-government* di Asia Pasifik, (Indrajit, 2003; 15), berpendapat bahwa: *E-government is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficient and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to information, and make government more accountable to citizens. E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih *effisien* dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi

terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Di Indonesia inisiatif ke arah *electronic government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat Indonesia yang berbasis informasi.

Untuk mendorong agar jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat dan mengelola *website* secara profesional serta menyeragamkan nama domain milik pemerintah, Depkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri No.28 tahun 2006 tentang pembuatan domain dengan penggunaan ekstensi *.go.id*. Kemudian disahkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu UU No.11 tahun 2008 juga merupakan dukungan untuk penyelenggaraan *electronic government*. Undang-undang ini telah memberi dukungan legal terhadap transaksi pelayanan publik yang dilakukan secara elektronik.

Wujud nyata dari implementasi *e-government* yang telah umum dilaksanakan adalah pembuatan *website* pemerintah daerah. *Website* pemerintah daerah merupakan pengembangan *e-government* di Indonesia yang memiliki sasaran

agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media *internet*. Dalam Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa penerapan *electronic government* juga merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, bahwa masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Masyarakat juga menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Dengan demikian pemerintah daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*.

Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah daerah otonom dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. (Buku panduan Koinfo, 2002 : 4).

Sebuah negara dan daerah memutuskan untuk mengimplementasikan *e-government* karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi didalam kerangka manajemen pemerintahan, akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas

dikalangan penyelenggara pemerintahan dan mendorong partisipasi masyarakat (Indrajit, 2007: 7). Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai *website* sebagai wujud dari pelaksanaan *e-government*, salah satunya adalah adanya *website* Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang telah menerapkan *electronic government*. Pembangunan *e-government* di Kabupaten Pringsewu di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Asisten III Bidang Administrasi Umum Hi. Djohan, SE., MM menyambut baik upaya Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* yang membidangi Teknologi informasi telah berupaya menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat. Daerah merupakan pusat kegiatan pembangunan, melalui pelaksanaan Otonomi Daerah maka arus informasi dalam berbagai kegiatan akan sangat cepat (Sumber : <http://www.pringsewukab.go.id/overview/page/92/d/171> diakses 10 Januari 2014). Sebagai jawaban dari hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B.346/KPTS/D.12/2013 tertanggal 16 September 2013 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Pringsewu membuat *website* resmi dengan alamat www.pringsewukab.go.id yang merupakan media informasi dan komunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Beliau menambahkan bahwa :

“Dalam perspektif internal Pemerintah, Saya berharap media ini dapat dioptimalkan oleh pemerintah untuk menginformasikan program atau kegiatan pembangunan. Dalam konteks ini Pemerintah harus memerankan dirinya sebagai penyedia layanan dan informasi seluas mungkin bagi kepentingan publik. Dalam perspektif eksternal Pemerintahan, Saya berharap media ini menjadi media yang dapat dipakai oleh masyarakat luas untuk tidak saja mengikuti perkembangan wilayah ini namun juga

menjadi media yang menjadi titik masuk bagi peluang-peluang investasi baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, hingga pariwisata.”

(Sumber : <http://www.pringsewukab.go.id/overview/page/92/d/171> diakses pada 10 Januari 2014)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu telah memiliki jaringan *intranet* dan *internet* yang terkoneksi ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah setempat, dengan menempatkan *server* berkemampuan 1 *Tera Bytes* di Indonesia *Data Center* (IDC) Jakarta. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menerapkan *e-government* guna meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Penerapan *e-government* juga diharapkan akan mampu merealisasikan salah satu misi pemerintah daerah yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance and Clean Government*. Demikian diungkapkan Bupati Pringsewu Sujadi saat menerima kunjungan tim dari Balai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dipimpin Ir.Irwan Rawal Husdi, Selasa (28/10). (Sumber : <http://pringsewukab.go.id/pringsewu-menuju-e-government/>, diakses pada 4 November 2014). Beliau juga menambahkan :

“Artinya pengembangan *e-government* dilakukan dalam rangka penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, agar pelayanan publik dan segala informasi dapat diakses secara mudah dan terjangkau oleh masyarakat.”

(Sumber : <http://pringsewukab.go.id/pringsewu-menuju-e-government/>, diakses pada 4 November 2014).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto juga menyatakan bahwa Kabupaten Pringsewu telah siap menuju *e-government*, baik SDM maupun infrastruktur. Sebagaimana dikutip dalam *saibumi.com*, Beliau menyatakan bahwa :

“Saat inipun, masyarakat telah dapat mengakses informasi dari Pemda Pringsewu melalui situs www.pringsewukab.go.id, dan bahkan antar SKPD pun telah terkoneksi dengan *intranet*, dan *internet*,”

(Sumber: <http://www.saibumi.com/artikel-59035-terima-kunjungan-bppt-pringsewu-siap-terapkan-egovernment-melalui-ti.html>, diakses pada 4 November 2014).

Akan tetapi saat ini pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Pringsewu yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu masih kurang memanfaatkan *website* sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah terlebih untuk pelayanan publik, hal tersebut dapat dilihat dari sarana aplikasi *website* yang kurang memadai seperti belum tersedianya sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, tidak adanya status *online* pada *website* bagi petugas yang mengelola dan terdapat beberapa layanan informasi yang tidak dapat diakses. *Website* Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga belum menyediakan fasilitas aplikasi *polling* yang dapat di manfaatkan untuk menjangar aspirasi masyarakat terhadap isu daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam menentukan suatu kebijakan, sehingga iklim demokrasi yang menjadi tujuan implementasi *e-government* belum dapat dicapai. Fasilitas interaksi yang disediakan dalam *website* Pemerintah Daerah setidaknya terdiri dari buku tamu, *forum* diskusi, *chatting*, *online support*, *link* kontak, dan *polling*. (Wibawa , 2009; 114).

Selain menampilkan informasi mengenai berita dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, *website* Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga menyediakan sarana buku tamu bagi pengunjung *website*, akan tetapi fasilitas ini hanya memungkinkan pengunjung *website* atau masyarakat untuk menuliskan komentarnya tanpa ada tanggapan dari pengelola *website* atau tidak dapat berinteraksi langsung. Dengan demikian interaksi tidak berjalan dua arah antara masyarakat dengan pemerintah melainkan hanya satu arah.

Website Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga terdapat *link* kontak yang menyediakan fasilitas aplikasi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang merupakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui dan ikut mengawasi pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Pringsewu, akan tetapi fasilitas ini juga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena hanya menghubungkan dengan *website* BPKAD yang tidak memiliki konten informasi apapun, sehingga tujuan meningkatkan transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui *e-government* belum dapat dicapai. Oleh karena itu, pengelolaan *e-government* di Kabupaten Pringsewu terlihat belum serius dalam pemanfaatan dan pengembangannya karena sarana aplikasi yang tersedia dalam *website* belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan penerapan *e-government*. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi *Electronic Government* Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi *electronic government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Tahun 2014?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi *electronic government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi *electronic government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi *electronic government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi studi Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu selaku pihak pengelola *website* Pemerintah Kabupaten Pringsewu guna mengembangkan implementasi *electronic government* melalui *website* Pemerintah Daerah.